BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam sejarahnya, PT. KAI (Persero) mengalami beberapa tahap kekuasaan yaitu:

1. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda,
2. Zaman Pendudukan Jepang,
3. Zaman Pemerintahan Republik Indonesia.

1. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda (1869-1925)

Kereta api telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-19. Kereta api pertama dijalankan pada tanggal 17 juni 1868 antara Semarang dan Tanjung dengan jarak 26 km.

Motivasi pendirian perusahaan kereta api oleh Kolonial Belanda adalah sebagai sarana logistic untuk menunjang kebutuhan ekonomi Belanda terutama sejak terjadinya Revolusi Industri di Eropa yang mendorong Belanda untuk mengekspor hasil bumi dari Indonesia. Pada zaman ini terdapat sekitar 12 perusahaan kereta api milik swasta dan hanya satu milik Negara. Pada tahun 1895 jaringan jalan kereta api tidak hanya terdapat di Jawa, Madura dan Sumatra saja tetapi juga di Sulawesi.

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

2. Zaman Pendudukan Jepang (1925-1945).

Pada zaman pendudukan jepang, seluruh jaringan kereta api pada pemerintahan belanda dikuasai oleh Jepang dan diberi nama **RYUKU KYOKU** yang kemudian berubah nama menjadi **TEDSUDO KYOKU** yang berkantor pusat di Bandung. Sedangkan perkeretaapian di Sumatra di sebut **TEDSUDO TAI** dan berkantor pusat di Bukittinggi**.**

Berbeda halnya dengan zaman pemerintahan Belanda, seluruh kegiatan perkeretaapian pada zaman Jepang dimaksudkan dalam rangka mendukung usahanya memenangkan perang, dimana lintas-lintas cabang dan rel sebagian dibongkar dan dialihkan dari Indonesia untuk pemasangan lintasan Thailand-Myanmar, kemudian bengkel-bengkel perkeretaapian sebagaian dijadikan bengkel alat-alat perang atau militer. Pengolahan tersebut meliputi :

a. Daerah jawa dibawah pimpinan Angkata Darat (Tedsudo Kyuku) dibagi dalam 3 daerah, yaitu :
   1) Bagian Barat (Sebu Kyuku),
   2) Bagian Tengah (khubu Kyuku),
   3) Bagian Timur (Tobu Kyuku).
b. Masing-masing daerah tersebut dibagi kedalam beberapa daerah eksploitasi yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh kepala inspeksi (Zimushotyo), meliputi :
   1) Aceh dan SDM (Sumatera Tedsudo),
   2) Sumatera Barat (Soibu Sumatera Tedsudo),

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

3) Sumatera Selatan (Nanbu Sumatera Tedsudo).

3. Zaman Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan republic Indonesia tanggal 17 agustus 1945, penguasaan perkeretaapian mulai beralih ketangan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 28 September 1945 didirikanlah Djawatan Kereta Api Indonesia (DKARI) sebagai perusahaan kereta api pertama setelah pengalihan Indonesia. Pada masa ini banyak kesulitan dan hambatan yang mengakibatkan timbulnya kelemahan diberbagai aspek usaha. Para pemuda kereta api yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan perkeretaapian di tanah air.

Pada tanggal 27 September 1949 pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintahan No. 2 yang isinya menyatakan bahwa Djawata kereta Api Indonesia (DKARI) dan Staat Spoorwagen (SS) digabungkan menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Kemudian tanggal 25 Mei 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 status perkeretaapian berubah dari Djawatan Kereta Api (DKA) mennjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1991 terhitung mulai tanggal 2 Januari 1991 PJKA telah berubah status menjadi perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), yang artintya seluruh kepemilikan dikuasai oleh Negara. Selaras dengan moderenisasi perkeretaapian dalam kaiktannya dengan

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

system transportasi nasional dan guna menghadapi persaingan usaha, maka PERUMKA dituntut untuk mampu meningkatkan kondisi perusahaan dari semua sector yang ada kearah yang lebih baik. Oleh karena itu PERUMKA berusaha menekan segala kerugian yang terjadi dengan berusaha meningkatkan produktifitas kereta api dengan menggunakan peralatan secara optimal sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 teerhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 perusahaan kereta api telah di alihkan usahanya oleh pemerintah dari PERUMKA menjadi PT. Kereta Api dengan bentuk persero. Pemerintah mengharapkan dengan perubahan status ini akan mampu meningkatkan kinerja usaha kereta api kearah yang lebih baik lagi guna menunjang pembangunan nasional, khususnya dibidang transportasi, selain itu sebagai upaya untuk mempersiapkan perusahaan untuk go public. Dengan pengalihan bentuk tersebut maka PERUMKA dinyatakan bubar pada saat pendirian perseroan tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai PERUMKA yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada perusahaan perseroan tersebut.

2.1.1 Misi dan Visi Perusahaan

PT. KAI (Persero) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya menganut misi dan visi perusahaan sebagai berikut :

1. **Misi PT. Kereta api Indonesia :**

   Mewujudkan transportasi yang bersifat masal untuk pertumbuhan

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

ekonomi, serta menunjang pembangunan sektor lainnya dan program pemerataannya.

2. **Visi PT. Kereta api Indonesia :**

   Berkembang menjadi besar, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memperoleh laba dan karyawan sejahtera.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang dianut dan diterapkan oleh PT. KAI (Persero) adalah struktur organisasi garis dan staff dimana didalamnya terdapat pengawasan secara langsung dan spesialisasi dalam pekerjaan. Bagan struktur organisai terlampir dalam lampiran.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, PT. KAI (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan penyelenggara yang oleh pemerintah RI diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perkeretaapian di Indonesia. Fungsi atau kedudukan hukum dan tugas pokok PT. KAI (Persero) tersebut didasarkan pada :

a. UU RI No. 9 tahun 1969 tentang PERPU No. 1 Tahun 1969 perihal bentuk-bentuk usaha Negara menjadi Undang-Undang (UU No. 9/69),
b. UU RI No. 13 Tahun 1992 tanggal 11 Maret 1992 tentang perkeretaapian (UU No. 13/92) Peraturan Pemerintah RI No. 3 taanggal 25 Januari 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO (PP No. 3/83),

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

c. Peraturan Pemerintah RI No. 57 tanggal 30 Oktober 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi perusahaan umum (Perum) Kereta Api (PP No. 57/90).

2.3 Deskripsi Jabatan

Sebagai penjabaran dari surat keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. KEP. U/OT.003/I/4/KA.2001 tanggal 2 Januari 2001 mengenai organisasi dan tata laksana pada PT. KAI (Persero). Fungsi dan tugas pokok pada setiap bagian adalah sebagai berikut :

1. Direksi

   Mempunyai tugas dan wewenang :

   a. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan dan tugas pokok perusahaan,

   b. Menguasai, mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan serta mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan,

   c. Melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh menteri.

   d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan.

2. Direktur Utama

   a. Membuat atau memberikan masukan pertimbangan dan saran untuk kebijaksanaan teknins,

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

b. Bertindak untuk dan atas nama Direksi untuk semua bidang,

c. Memimpin kegiatan direktorat.

3. Direktorat Keuangan (DITKU)

Fungsi Direktorat Keuangan dalam system organisasi berada dibawah pengawasan direktorat utama (pasal 9) yaitu :

a. Melaksanakan penyusunan otoritas, pengendalian rencana kerja dan anggaran perusahaan serta sumber-sumber dana dan pengguanaan dana.

b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian peraturan-peraturan keuangan perusahaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta melaksanakan pengesahan pembayaran baik internal maupun eksternal.

c. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian akuntansi umum, akuntansi biaya dan pengurusan perbendaharaan kas kantor pusat.

d. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian analisa dan penghitungan biaya serta kelayakan investasi.

Tugas pokok Direktorat Keuangan adalah melaksanakan perumusan kebijakan serta pengelolaan keuangan yang meliputi :

a) Penyusunan rencana kerja anggaran pengendalian,

b) Pelaksanaan administrasi keuangan,

c) Pelaksanaan akuntansi umum dan akuntansi biaya,

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

d) Pelaksanaan analisa pengendalian atau penghitungan biaya dan kelayakan investasi.

4. Direktorat Teknik

   a. Melaksanakan pembinaan program pembangunan prsarana pokok dan saran angkutan.

   b. Melaksanakan program pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan.

   c. Melaksanakan penyusunan program pemeliharaan perbaikan serta pemasangan baru.

5. Direktorat Operasi dan Pemasaran

   a. Melaksanakan penyusunan program pendayagunaan dan pengoperasian sarana angkutan dan pemeliharaan sarana.

   b. Melaksanakan pengoprasian lalu lintas perjalanan kereta api.

   c. Melaksanakan pemasaran angkutan penumpang, melaksanakan penyiapan penyusunan program pemasaran dan evaluasi angkutan penumpang.

6. Direktorat Personalia dan Umum

Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pengendalian personalia di bidang administrasi personalia, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan antarlembaga.

7. Pusat Perencanaan dan Pengembangan

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

Menyusun rencana kerja pembangunan, prasarana, sarana anngkutan serta meneliti dana pengembangan organisasi dan tataa laksana.

8. Pusat Pendidikan Latihan

   a. Pembinaan program penyelenggaraan pendidikan dan latihan dilingkungan perusahaan.

   b. Pengendalian evaluasi pendidikan dan latihan di lingkungan perusahaan.

9. Satuan Pengawasan Intern

   a. Membantu direktur utama dalam mengadakan pemeriksaan intern perusahaan.

   b. Memberikan sarana perbaikan termasuk masalah keuangan.

10. Bagian Logistik

   a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengadaan serta pengelolaan dokumen barang-barang perusahaan.

   b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi logistic

   c. Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap unit-unit pelaksana teknis pergudangan,inklaring dan unit percetakan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 KM tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja PERUM Kereta Api Tingkat Pusat. Aktivitas dari PT. KAI (Persero) itu sendiri mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

pengusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api dlam memperlancar arus perpindahan orang atau barang secara massal untuk menunjang pembangunan nasional.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut PT. KAI mempunyai fungsi pokok antara lain :

1. Penyediaan, pengoperasian, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan, pengendalian dan pengembangan secara angkutan diatas jalan rel merupakan kelanjutan kereta api.
2. Penyediaan, pemeliharaan, perbaikan dan pendayagunaan prasarana jalan rel, jembatan terowongan, instalasi sinyal dan telekomunikasi, instalasi umum dan listrik atas, serta penyediaan dan pendayagunaan bangunan stasiun, pembangunan dipo yang menunjang bangunan kereta api.
3. Pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian, pengusaha stasiun unntuk pemberangkatan, penurunan dan angkutan penumpang maupun barang serta jasa angkutan lain yang dekat.
4. Pengelolaan dan daya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya manusia
5. Pengelolaan dan pendayagunaan keuangan perusahaan.
6. Pengawasan intern.

Adapun perusahaan pelayanan jasa angkutan yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) meliputi :

This document was created using Smart PDF Creator To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

1. Pengakuan penumpang
2. Pengakuan barang berupa pengakuan bahan bakar, mesin, pupuk dan lain-lain.
3. Selain poin 1 dan 2 PT. KAI (Persero) juga senantiasa membantu kegiatan perdagangan ekspor, impor, pengakuan kepariwisataan dan lain-lain yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangunan.

Untuk menunjang operasional PT. KAI (Persero) di bagi atas 9 wilayah usaha dijawa dan 4 divisi serta wilayah Sumatera yang terbagi menjadi berbagi divisi regional. Wilayah usaha Jawa terdiri dari 9 operasi yaitu :

1. Jakarta
2. Bandung
3. Cirebon
4. Semarang
5. Purwekerto
6. Yogyakarta
7. Madiun
8. Surabaya

Divisi-divisi yang ada di PT. KAI (Persero) yaitu :

1. Divisi Sarana
2. Divisi Usaha Pendukung

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com

3. Divisi Pelatihan

4. Divisi Angkutan Perkotaan (Jabotabek)

PT. KAI dalam melaksanakan operasinya, menetapkan beberapa strategi tertentu, yaitu :

a. Strategi Pemantapan (Stabilisasi)

   Hakekatnya merupakan strategi produksi yang ada dipasar yang telah tersedia.

b. Strategi Peningkatan (Improvisasi)

   Hakekatnya merupakan strategi peningkatan atau pengembangan pasar untuk produksi yang ada dipasar yang telah tersedia.

c. Strategi Pengembangan (Expansi)

   Merupakan strategi pengembangan produksi baru atau perluasan pasar yang telah dihasilkan dari pengembanga pasar, meskipun ada peraturan lebih lanjut yang disesuaikan dengan BUMN di lingkungan departemen perhubungan memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pengusaha angkutan Kereta Api.

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com